



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILIHUR  
NOMOR : 800.1.11.1/462/ SK.LAKIP/ XII / 2024

TENTANG  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

**CAMAT JATILUHUR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan di pandang perlu untuk menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Kecamatan Jatiluhur yang disusun dengan mengacu pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024 pada Pemerintah Kecamatan Jatiluhur yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Jatiluhur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tahun 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 No. 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Jatiluhur Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024 Kecamatan Jatiluhur;
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan laporan Kinerja Kecamatan Jatiluhur kepada Bupati ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatiluhur  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

**CAMAT JATILUHUR**



**ENDANG SAEPUDIN, SKM. KP**  
NIP. 19800408 200701 1 004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Banguan Daerah Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR**  
Nomor : 800.1.11.1/462/ SK.LAKIP/ XII / 2024  
Tanggal : 31 Desember 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintahan (Lakip) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten  
Purwakarta Tahun 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN (LAKIP) KECAMATAN JATILUHUR  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	
		Panitia	Kedinasan
1.	Endang Saepudin, SKM, KP Nip. 19800408 200701 1 004	Ketua	Camat
2.	Sri Nani Susilawati, SM Nip. 19860101 201001 2 004	Sekretaris	Plt. Sekretaris Camat
3.	Muhamad Yusup, SE Nip. 19790405 200801 1 003	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Chandra Kisty Anggraeni, S.IP Nip. 19790213 200901 2 001	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
5.	TB. Ajat Rudiana, SH NIP. 19670818 199011 1 002	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	Dayan Noor Janapriya, SE Nip. 19830507 201001 1 002	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.	Sri Nani Susilawati, SM Nip. 19860101 201001 2 004	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
8.	Pitri Susanti, SH Nip. 19850203 201001 2 004	Anggota	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
9.	Pitri Susanti, SH Nip. 19850203 201001 2 004	Anggota	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Jajang Ruhiyat Nip.19820926 200801 1 001	Anggota	Bendahara
11.	Roni Suhendar, S.HI	Anggota	Operator TIK

**CAMAT JATILUHUR**  
  
**ENDANG SAEPUDIN, SKM. KP**  
**NIP. 19800408 200701 1 004**